

**MEMO HUKUM**

**MARIA REGINA RATNA NOVITA**

**PENERAPAN PERADILAN TERPIDANA ANAK-ANAK  
DI PT MEDAN**

**(Study Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi  
No. 138/Pid/B/1987 Pengadilan Tinggi Medan)**

*Pid. 672/95  
Nov  
P.*



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**1995**

**MARIA REGINA RATNA NOVITA**

**PENERAPAN PERADILAN TERPIDANA ANAK-ANAK  
DI PT MEDAN**

**(Study Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi  
No. 138/Pid/B/1987 Pengadilan Tinggi Medan)**



**MEMO HUKUM**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN SKRIPSI  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

**SOEHARJO, S.H.**

**NIP: 130517139**

**Penyusun**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' and 'R' followed by several loops and a final flourish.

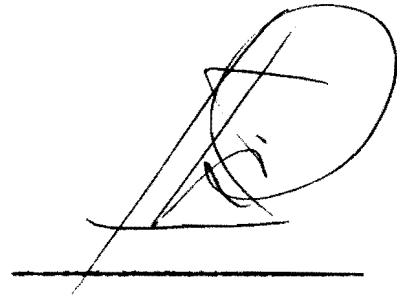
**MARIA REGINA RATNA NOVITA**

**NIM: 039113396**

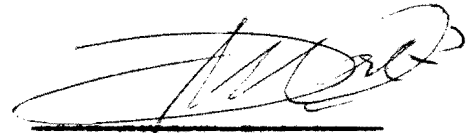
**Memo Hukum berjudul "Penerapan Peradilan Terpidana Anak-anak Di PT Medan (Study Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi No. 138/Pid/B/1987 Pengadilan Tinggi Medan)" telah diuji dan disahkan pada tanggal 26 Januari 1995 oleh :**

**Tim Penguji :**


**Ketua : Richard Wahyudi, S.H., M.S.  
(130531815)**



**Sekretaris : Soedarti, S.H.  
(130675517)  
23**



**Anggota : Soeharjo, S.H.  
(130517139)**



#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

- a. Peradilan anak di Indonesia masih merupakan permasalahan yang belum terpecahkan sampai saat ini, walaupun para sarjana dan ahli hukum telah berusaha dengan mengadakan seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya.
- b. Pada tahun 1967, telah berhasil disusun suatu rancangan undang-undang tentang peradilan anak oleh BPN, tetapi sebelum disahkan, muncul UU no. 14/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sehingga RUU tersebut harus disesuaikan dengan UU no. 14/1970. Juga harus memperhatikan bahan-bahan dari hasil seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya tentang peradilan anak, yang diadakan setelah tahun 1967.
- c. Dengan adanya UU no. 14/1967, tidak memberi tempat pada pengadilan anak berdiri sendiri, tetapi dapat berada di bawah peradilan umum, sehingga yang khusus mengadili perkara anak, begitu juga dengan Pengadilan Tinggi.
- d. Pengadilan anak meliputi perkara pidana dan perkara perdata yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.
- e. Negara-negara di dunia, bahkan dunia internasional juga sangat memperhatikan dasar-dasar peradilan anak. Banyak negara yang sudah memiliki pengadilan anak

tersendiri yang terpisah dari pengadilan orang dewasa.

- f. PBB juga memperhatikan hak anak-anak dengan mengesahkan deklarasi hak anak-anak.

## 2. Saran

Alangkah baiknya bila pemerintah mengesahkan sebuah undang-undang mengenai pelaksanaan peradilan anak, agar ada dasar dan kepastian hukum mengenai pengadilan anak, yang harus dibedakan dengan peradilan orang dewasa, baik hukum materiel maupun hukum formil/hukum acaranya.